



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

**Perpolitikan Tanah dalam Pembangunan
Rezim Intervensionis**
S. Aminah

**Sistem Kekerabatan dan Pembangunan
Ekosistem Pertanian pada Komunitas Indonesia:
Analisis Kasus Keluarga Jawa**
Doddy S. Singgih

Reclaiming Tanah Perkebunan
Bagong Suyanto

Konflik Tanah Perkebunan di Malang Selatan
Karnaji

**Resistensi Buruh Anak:
Studi Resistensi Buruh Anak dalam Hubungan Kerja
di Perkebunan Tembakau Ajung- Jember,
Prop. Jawa Timur**
Sudarso

**Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Perspektif Teori dan Praktek**
Jusuf Irianto

Dampak Sosial Budaya dari Industri Pariwisata
M. Nurdin

Resensi Buku:
Bersaksi untuk Pembaruan Agraria
Helmy Prasetyo

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum
Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum
I. Basis Susilo

Penanggungjawab
Kris Nugroho

Dewan Redaksi
Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)
Ramlan Surbakti (Unair)
Daniel Theodore Sparringa (Unair)
Mohtar Mas'ood (UGM)
Ashadi Siregar (UGM)
Herudjati Purwoko (Undip)
Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi
Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi
Harijono

Redaksi Pelaksana
Bagong Suyanto
Yuyun Wahyu Izzati
Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran
Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981
ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia
Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492
e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

Pengantar Redaksi

Pada edisi nomor 4 (Oktober) 2003 ini jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* mengangkat topik utama tentang *Tanah dan Pembangunan*. Dari hasil seleksi artikel yang masuk ke redaksi, beberapa penulis memberikan analisis mengenai dampak politik pertanahan yang terjadi di Indonesia sampai bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap penguasa ketika tanah yang mereka upayakan diambil alih oleh mereka yang mengatasnamakan negara, di sisi lain perlawanan masyarakat menghendaki upaya redistribusi secara merata melalui *reclaiming* mulai marak terutama semenjak kejatuhan rejim Orde Baru. Artikel yang ditulis Siti Aminah misalnya, menjelaskan perpolitikan tanah dalam pembangunan rejim intervensionis. Kemudian artikel konseptual yang ditulis Doddy S. Singgih memberikan penjelasan tentang sistem kekerabatan dan pembangunan ekosistem pertanian pada kasus keluarga Jawa. Dengan nada yang sama upaya *reclaiming* tanah perkebunan ditulis oleh Bagong Suyanto. Dari hasil penelitian juga dihadirkan yaitu konflik tanah perkebunan di Malang Selatan dipaparkan oleh Karnaji secara gamblang, selain itu ringkasan tesis dari Sudarso tentang resistensi buruh anak terutama di perkebunan tembakau. Di samping topik pertanahan juga dihadirkan tema pengembangan sumber daya manusia oleh Jusuf Irianto, dampak sosial budaya dari industri pariwisata oleh M. Nurdin serta resensi buku dari Helmy Prasetyo tentang bersaksi untuk pembaruan agraria: dari tuntutan lokal hingga kecenderungan global.

Terlepas dari bentuk perlawanan yang dilakukan, tindakan petani berunjuk rasa atau merusak tanaman di lahan sengketa, sesungguhnya merupakan bentuk ekspresi dari ketidakpuasan dan rasa diperlakukan tidak adil oleh berbagai kebijakan yang berpola *top-down*. Penerapan UUPA yang dinilai bias dan hanya membela kepentingan pemilik modal dan negara, dipersepsi rakyat atau petani pada khususnya bukan hanya membuat terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur penguasaan, pemilikan dan penyewaan tanah, tetapi juga perubahan-perubahan dalam distribusi pendapatan dan status sosial.

Akhirnya, semoga jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini bisa menambah wawasan dan sekaligus menjadi media bagi ilmuwan-ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan pihak penyelenggara pemerintah agar lebih empatif dalam memahami dinamika masyarakat.

Tim Redaksi

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2004:
Dinamika Politik dan Pemilu di Indonesia

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Perpolitikan Tanah Dalam Pembangunan Rezim Intervensionis

S. Aminah

1

Sistem Kekerabatan dan Pembangunan Ekosistem Pertanian pada Komunitas Indonesia: Analisis Kasus Keluarga Jawa

Doddy S. Singgih

13

Reclaiming Tanah Perkebunan

Bagong Suyanto

23

Konflik Tanah Perkebunan di Malang Selatan

Karnaji

29

Resistensi Buruh Anak: Studi Resistensi Buruh Anak dalam Hubungan Kerja Di Perkebunan Tembakau Ajung- Jember, Prop. Jawa Timur

Sударso

52

Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia: Perspektif Teori dan Praktek

Jusuf Irianto

67

Dampak Sosial Budaya dari Industri Pariwisata

M. Nurdin

83

Resensi Buku

Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global

Helmy Prasetyo Yuwinanto

91

DAMPAK SOSIAL BUDAYA DARI INDUSTRI PARIWISATA

M. Nurdin

Dosen Program Studi DIII Pariwisata FISIP Unair

Abstract

The Socio cultural Impact of tourism arises when tourism brings out value system and behaviour changes and threatens indigenous indentity. Changes also occur in community structure, ceremonies and morality.

Keywords: Social culture impacts of tourism

Dampak sosial budaya dari pariwisata memberikan gambaran tentang pengaruh-pengaruh yang muncul terhadap komunitas "tuan rumah" dalam hal ini masyarakat lokal sekitar daerah wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berinteraksi dengan wisatawan (nusantara maupun asing), dan interaksinya dengan Industri pariwisata. Dengan berbagai alasan, masyarakat lokal cenderung menjadi kelompok yang lemah bila berhadapan dengan kepentingan – kepentingan wisatawan, penyelenggara wisata (Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan dsb), dan interaksi dua kelompok tersebut relatif sulit untuk diukur dan diidentifikasi karena pengaruhnya tidak selalu nyata. Dampak-dampak tersebut muncul ketika pariwisata mulai mempengaruhi sistem nilai dan perilaku masyarakat lokal, dengan demikian ancaman terhadap keberadaan identitas

asli masyarakat dapat diidentifikasi. Lebih jauh lagi, perubahan tersebut cenderung terjadi terhadap struktur masyarakat, hubungan antar keluarga, pola hidup kolektif yang tradisional, upacara-upacara adat dan sebagainya, meskipun pariwisata dapat juga memberikan dampak positif seperti pertukaran budaya antara suku dan negara, membantu perlindungan terhadap tradisi budaya dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan lokal.

Dampak Negatif dari Industri Pariwisata

Perubahan atau hilangnya identitas dan nilai-nilai asli Pariwisata dapat menyebabkan perubahan atau hilangnya identitas lokal dan nilai-nilai, beberapa faktor penyebabnya adalah:

a. Komersialisasi Budaya

Kebudayaan merupakan hasil karya manusia baik berupa pikiran,

perbuatan dan benda-benda budaya, dimana manifestasi kebudayaan itulah yang dihadapkan kepada wisatawan untuk dinikmati sebagai sebuah atraksi wisata, manifestasi kebudayaan tersebut sangatlah beraneka ragam baik berupa peninggalan kebudayaan atau *tourist heritage*, seperti candi-candi yang ada di Indonesia, atau keris, adapula manifestasi yang masih dibuat baik berupa artifact seperti pahatan, ukiran, lukisan maupun berupa perilaku manusia seperti kegiatan di pasar tradisional, kehidupan nelayan dan sebagainya. Selain itu pula ada kegiatan masyarakat yang berupa upacara-upacara tradisional dan yang bersifat religius. Secara langsung maupun tak langsung, pariwisata berpengaruh terhadap manifestasi kebudayaan diatas. Pariwisata dapat mengakibatkan budaya lokal menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan ketika upacara-upacara ritual, upacara adat tradisional diadakan untuk permintaan, harapan dan kepuasan wisatawan maka akan muncul istilah "rekonstruksi kebudayaan". Pada saat suatu daerah dinyatakan menjadi daerah tujuan wisata, maka permintaan akan souvenir, benda-benda seni dan semacamnya merupakan komoditas belaka yang pada akhirnya akan mempengaruhi pergeseran nilai budaya masyarakat di tempat tersebut, karena tempat-tempat suci dan sakral tidak lagi dihormati dan disegani, kecuali hanya sebagai komoditas yang layak untuk dijual.

b. Standarisasi Pelayanan

Pada umumnya, pariwisata di berbagai tempat cenderung memiliki standarisasi dalam pelayanannya baik fisik maupun non fisik, yang semua itu merujuk pada kepuasan dan kepentingan wisatawan yang cenderung ingin menikmati sesuatu yang tidak terdapat di daerah asalnya meskipun tidak semuanya baru karena sebagian wisatawan akan menolak bila obyek wisata dan pelayanan fasilitasnya benar-benar baru atau tidak familiar dengannya, berbeda dengan sebagian lagi wisatawan yang memang menginginkan atraksi tersebut benar-benar baru dan belum pernah ia kunjungi. Wisatawan cenderung mencari fasilitas yang familiar meskipun ia berada diluar daerah asalnya, seperti hotel bertaraf internasional maupun akomodasi yang setara dengan itu.

Mengadaptasi budaya dan perilaku masyarakat setempat merupakan keinginan sebagian besar wisatawan, seolah-olah mereka merupakan bagian dari masyarakat tersebut, meskipun hanya sekilas tetapi hal itu telah menyebabkan terganggunya keaslian budaya masyarakat lokal tersebut.

Selain budaya perilaku, wisatawan tertarik pada souvenir, kerajinan tangan, benda-benda seni lainnya, yang merupakan salah satu bukti bahwa mereka pernah mengunjungi tempat tersebut dan memperlihatkannya kepada relasi di daerah asalnya, dan para pengrajin lokal mulai mengantisipasi permintaan

tersebut dengan membuat perubahan pada karyanya baik desain maupun bahannya agar sesuai dengan selera wisatawan tersebut. Meskipun selera wisatawan telah meningkatkan betapa berharganya hasil karya masyarakat tersebut dan membantu secara tidak langsung pelestarian tradisi budaya, tetapi juga menyebabkan luntarnya budaya dengan selalu menganggap karya seni sebagai komoditas seperti banyak terjadi di Bali dan tempat-tempat wisata terkenal lainnya.

c. Pergesekan Budaya

Karena pariwisata melibatkan pergerakan individu-individu yang berada di daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan menyebabkan terjadinya hubungan sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal dimana, hubungan tersebut bersifat sementara (selama individu dalam hal ini wisatawan, tinggal di daerah wisata), maka memunculkan pergesekan budaya yang disebabkan karena perbedaan budaya, suku, gaya hidup, bahasa, keyakinan dan tingkat kesejahteraan antar keduanya. Hal ini mudah dimengerti, karena wisatawan bukanlah bagian masyarakat lokal suatu daerah wisata sehingga keduanya memiliki perbedaan latarbelakang budaya yang berbeda dan sudah sewajarnya terjadi saling mempengaruhi antara masyarakat lokal dengan wisatawan tersebut.

Kondisi tersebut akan menghasilkan eksploitasi yang berlebihan pada daya dukung sosial (Batas toleransi

perubahan pada sistem sosial baik dalam maupun luar dari daerah wisata) dan daya dukung budaya (Batas toleransi perubahan budaya masyarakat) pada masyarakat lokal. Di satu pihak masyarakat lokal bersikap positif berpartisipasi mengembangkan pariwisata, yang diwujudkan dengan bersikap ramah kepada wisatawan; seiring dengan itu, sikap negatif juga berkembang pada sebagian masyarakat tersebut. Meskipun pengaruh baik positif maupun negatif tersebut memiliki tingkatan yang berbeda-beda tergantung dari model tingkah laku wisatawan seperti model Enklave atau Ghetto, dimana wisatawan yang beraktifitas disekitar hotel, bersenang-senang dan sangat kurang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, model Berbaur, dimana wisatawan beraktifitas dengan melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar, tinggal di hotel yang terletak diantara di rumah-rumah penduduk bahkan mereka sesekali tinggal dengan masyarakat tersebut, dan yang terakhir model Individual, yaitu mereka beraktifitas jauh dari keramaian dan tidak terpusat dari aktifitas pariwisata yang banyak menarik wisatawan secara umum, model individual ini cenderung sangat erat berinteraksi dengan penduduk dan bersifat petualang. (R.G Soekadijo, 1996:279).

Pengaruh yang paling dominan pada masyarakat lokal berasal dari model Enklave(Ghetto) dan Berbaur, yang berakibat munculnya gesekan budaya dapat melalui :

1. Ketidaksejajaran kondisi ekonomi
Sebagian besar wisatawan berasal dari masyarakat yang berbeda dalam pola konsumsi dan gaya hidup dibanding masyarakat di daerah wisata, baik dalam berpelesir, menghabiskan sejumlah besar uang, dan kadang-kadang berperilaku diluar kebiasaan mereka. Dan salah satu dampaknya adalah masyarakat lokal yang berinteraksi dengan wisatawan tersebut menirukan sebagian kebiasaan wisatawan tersebut, hal ini sering terjadi terutama pada masyarakat di negara-negara dunia ketiga, dimana perbedaan kesejahteraan terlihat begitu jelas antara yang kaya dan yang miskin, sehingga kesenjangan ekonomi relatif tinggi.. Contohnya, resor – resor di Indonesia, Jamaica, atau Brazil, para karyawan yang bekerja di industri pariwisata mempunyai penghasilan antara 1.200 sampai 3.000 dollar Amerika per tahun, berinteraksi dengan wisatawan yang berpenghasilan 80.000 dollar Amerika.

2. Gangguan disebabkan perilaku wisatawan
Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa manifestasi kebudayaan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat lokal, tetapi dengan perlakuan dan penyajian antara wisatawan dalam menikmati atraksi budaya tersebut dengan masyarakat sebagai pihak yang melayani keinginan wisatawan tersebut maka lambatlaun mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai kebudayaan, seperti penyajian

tarian adata tradisional yang sakral atau upacara-upacara keagamaan maka nilai sakral tersebut akab berubah menjadi nilai tontonan, meskipun adakalanya pergeseran tersebut diterima dalam kebudayaan masyarakat setempat seperti di Bali, pada tahun 1980 sepasang wisatawan asing melakukan perkawinan yang diselenggarakan secara adat Hindu Bali dan ironinya yang menjadi penyelenggara adalah orang-orang Bali sendiri atau tari Barong yang seharusnya tidak boleh dipertontonkan kepada khalayak umum, sudah dipertunjukkan didepan wisatawan bahkan disediakan tempat semacam teater dengan tata suara untuk memberikan kesan dramatis bagi wisatawan.meskipun sebelum acara dimulai diadakan sesajian untuk permintaan ijin kepada Sang Hyang Widhi. Dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi erosi kebudayaan.Disisi lain. wisatawan sering berperilaku mengabaikan dan tidak menghormati adat dan kebiasaan masyarakat lokal daerah wisata, sehingga cenderung meninggalkan persepsi yang negatif terhadap wisatawan karena mereka dianggap hanya mengganggu kehidupan masyarakat lokal, seperti dengan meninggalkan kebiasaan berbusana minim, berciuman didepan umum atau minum bir yang mana pada sebagian masyarakat daerah tujuan wisata hal tersebut dianggap mencemarkan kebiasaan yang negatif dan cenderung ditiru.

3. Klasifikasi Pekerjaan

Industri pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan yang relatif luas,

semakin berkembang industri pariwisata disuatu daerah wisata atau negara tujuan wisata, semakin besar pula ketersediaan terhadap lapangan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut. Hanya saja pembagian lapangan pekerjaan tersebut cenderung tidak seimbang dimana porsi dari posisi pekerjaan yang strategis lebih banyak dipegang oleh individu – individu yang bukan masyarakat lokal atau berasal dari daerah atau negara lain. Terutama pada negara-negara berkembang, banyak pekerjaan di industri pariwisata, yang berada di manajemen tingkat bawah dilakukan oleh masyarakat lokal, seperti pelayan, pembersih rumah, tukang taman, dan pekerjaan praktis lainnya, sementara itu mereka yang dibayar lebih baik dan tingkat manajerial yang lebih tinggi adalah mereka yang berasal dari luar daerah atau orang asing. Hal ini disebabkan salah satunya oleh perbedaan kemampuan profesional, keberadaan hotel-hotel dan restoran-restoran yang bertaraf internasional, yang memang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang setara dengan ketrampilan dalam industri tersebut, kebanyakan menarik individu-individu yang justru berasal dari luar negeri atau luar daerah untuk bekerja disana dibanding masyarakat lokalnya.

Inilah yang menyebabkan perbedaan dan kesenjangan budaya diantara keduanya, meskipun dalam beberapa kasus, aktifitas pariwisata dirasakan memnatsu dan meningkatkan taraf ekonomi pada sebagian individu di masyarakat lokal, tetapi semua itu

tidak mampu memecahkan masalah sosial dan ekonomi masyarakat lokal secara keseluruhan, malah kadang-kadang cenderung menggantikan masalah lama dengan memunculkan masalah yang baru.

Sebagai contoh kasus, di Taman Nasional Taman Negara, Malaysia Barat merupakan resor yang mampu menampung ratusan pengunjung, dan mempekerjakan 270 orang karyawan, 60 % dari karyawan administrasi pusat adalah masyarakat lokal. Pada tahun 1999, karyawan loka tersebut berpenghasilan 120 US\$ perbulan; sebagai perbandingan, penghasilan masyarakat lokal pada waktu itu hanya sebesar 40 US\$. Meskipun terdapat dampak positif dari pengembangan taman nasional tersebut, perbedaan penghasilan dari dua kelompok masyarakat lokal tersebut telah memicu kesenjangan dan konflik sosial serta merangsang kenaikan terhadap kebutuhan hidup setiap harinya.

Pengaruh Pengembangan Fisik Memicu Ketegangan Sosial

Pengembangan fisik dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana industri pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata menyebabkan beberapa ketegangan sosial yang berdampak pada masyarakat lokal, diantaranya :

a. Konflik Penggunaan Sumberdaya Alam

Pengembangan pariwisata juga membutuhkan air dan energi seperti listrik dalam jumlah yang cukup besar, hal ini disadari oleh masyarakat lokal sebagai ancaman karena

penyediaan ke dua sumberdaya tersebut relatif terbatas jumlahnya, sehingga harus mengurangi jatah bagi masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat lokal tidak lagi dapat menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya – sumberdaya diatas yang semula menjadi milik umum (*Common Property*) diambil alih oleh industri pariwisata. Karena itu, pengembangan industri pariwisata, terutama didaerah pedesaan, harus mencakup usaha agar masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari industri tersebut.

b. Degradasi Lingkungan

Pada awalnya, sebelum munculnya industri pariwisata yang kompleks, suatu daerah wisata yang terletak di tengah-tengah kawasan alam yang didominasi oleh kegiatan masyarakatnya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, baik yang ada di daratan seperti pertanian, perkebunan, maupun yang ada dipesisir seperti nelayan, merasa dapat mengolah sumberdaya alam tersebut dengan tidak perlu merasa takut akan keterbatasan lingkungannya dinikmati oleh pihak lain, tetapi seiring dengan semakin pesatnya daerah wisata tersebut dipromosikan dan dikunjungi wisatawan maka pemanfaatan lahan tersebut semakin berkurang, baik karena kebijakan pemerintah ataupun individu – individu yang dulunya mengolah lahan pribadinya kini beralih fungsi dari pertanian misalnya ke usaha yang tidak berhubungan dengan pengolahan lahan atau menjual ke pengusaha untuk dijadikan

akomodasi wisatawan, yang secara tidak langsung kegiatan tersebut berdampak negatif pada pemanfaatan lahan secara keseluruhan terutama menyangkut keterbatasan energi listrik dan ketersediaan air bersih karena akan muncul prioritas untuk kepentingan industri tersebut dan masyarakat sekitar harus berbagi dengannya. Meningkatnya jumlah lahan yang digunakan oleh industri pariwisata sebagai infrastuktur menyebabkan meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat lokal seperti naiknya pajak untuk penyediaan air bersih, atau fasilitas umum lainnya.

c. Kemunduran Budaya

Kerusakan dan pencemaran budaya dimulai dari tindakan pengrusakan (*Vandalisme*), pengotoran, pencurian dan perbuatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan tempat-tempat bersejarah dan sakral. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada situs-situ arkeologi di beberapa negara seperti Mesir, Meksiko, Peru, Indonesia dan banyak lagi, dimana salah satu penyebabnya kurangnya penghasilan para karyawan yang ditugaskan untuk menjaga situs tersebut hingga akhirnya menjual benda-benda bersejarah tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Seperti yang terjadi di Trinil, Sangiran, disinyalir sebagian anggota masyarakat desa tersebut memiliki organisasi yang teratur rapi dalam penjualan benda-benda purbakala, karena mereka menyadari bahwa benda-benda tersebut memiliki nilai ekonomis yang

cukup tinggi dan menjualnya kepada kolektor – kolektor dalam negeri dan luar negeri, meskipun relatif sulit melacak keberadaan organisasi ini karena mereka berprofesi sebagai petani, hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman masyarakat sekitar akan penting dan berharganya peninggalan budaya seperti artefact tersebut. Lebih jauh lagi, kemunduran budaya ditandai dengan meningkatnya pengambilalihan lahan atau bangunan yang bersejarah yang seharusnya dilindungi, terutama di kota-kota besar seperti di Indonesia khususnya, hanya untuk keperluan bisnis atau bersifat komersial semata.

d. **Konflik Penggunaan Lahan**

Terutama pada daerah yang memiliki garis pantai dan pulau yang indah, sering terjadi eksploitasi yang berlebihan dalam pemanfaatannya. Konflik yang cenderung muncul berkaitan dengan pengembangan lahan tersebut untuk kepentingan fasilitas pariwisata atau infrastruktur dan kepentingan masyarakat lokal dalam mengelola lahan tersebut untuk pertanian atau lainnya. Ironinya, masyarakat lokal di daerah wisata tersebut sering kalah dalam mempertahankan lahannya dengan alasan pariwisata menjanjikan peningkatan ekonomi yang lebih besar di daerah tersebut dibanding kepentingan pemanfaatan lainnya.

Sebagai contoh bagaimana masyarakat lokal "menderita" akibat pengembangan suatu industri pariwisata terutama di daerah pantai yang sering

digunakan sebagai salah satu fasilitas hotel untuk wisatawan sehingga mengurangi area nelayan untuk mencari ikan atau menghalangi akses masyarakat lokal dalam berekreasi. Contoh kasus, Di Bali lahan pertanian utana dan sumber air banyak yang beralih fungsi sebagai lapangan golf dan hotel – hotel, sedangkan di Pengandaran Jawa Barat, desa yang berada di daerah pantai yang awalnya dimanfaatkan sebagai pendaratan perahu-perahu nelayan, pembuatan jaring dan aktifitas nelayan lainnya, sekarang sudah berpindah tangan ke pengusaha dan beralih menjadi hotel bintang lima.

Isu-isu Etika

Selain dampak-dampak diatas, industri pariwisata dapat memicu kondisi yang serius dimana pelanggaran norma-norma budaya dan kriminalitas mulai muncul. Meningkatnya kriminalitas pada umumnya seiring dengan meningkatnya urbanisasi pada suatu kawasan dan perkembangan pariwisata secara massal. Kehadiran para wisatawan terutama wisatawan asing yang biasanya membelanjakan uang dalam jumlah yang relatif banyak dan menggunakan perhiasan serta kamera misalnya, sering menarik tindakan kriminalitas seperti perampokan dan perdagangan obat-obat terlarang seperti di Jakarta dan Surabaya serta beberapa kota besar di Indonesia dan negara-negara penarik wisatawan (*Tourist Destination Countries*). Tekanan terhadap fenomena ini semakin memperburuk ketegangan social, seperti di Rio de Janero, Brazil, wisatawan asing yang tinggal di daerah pantai hotel bintang lima terletak berdampingan dengan komunitas masyarakat yang relatif miskin,

sehingga daerah tersebut rawan kriminal bagi wisatawan. Dengan penjagaan yang ketat dari satpam hotel, yang dipersenjatai senapan semakin memperburuk hubungan antara kegiatan pariwisata dengan masyarakat lokal tersebut yang sebenarnya mereka merasa disingkirkan dari tanah kelahirannya. Belum lagi munculnya perjudian di kawasan wisata tersebut yang tentu saja memberi dampak negatif terhadap perilaku sosial masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan International Labour Organization (ILO) PBB di beberapa negara tujuan wisata terutama negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa banyak sektor pekerjaan di industri pariwisata mengkondisikan lingkungan kerja yang tidak stabil, rendahnya penghasilan, minimnya pelatihan, waktu kerja yang panjang dan sedikitnya kesempatan untuk jenjang karir yang lebih baik, sedangkan persaingan dalam industri pariwisata sendiri sangat tinggi, membutuhkan akan perkembangan

sumberdaya manusia yang lebih terampil maupun teknologi tinggi yang digunakan, tetapi industri tersebut berusaha untuk menekan biaya operasional yang dikeluarkan, hingga menjadikan kondisi tersebut menjadi semakin sulit bagi mereka yang berada di posisi manajemen bawah, dan memunculkan perekrutan anak dibawah umur sebagai tenaga kerja dengan gaji yang lebih murah dan fleksibel untuk tidak diperkerjakan lagi bila tidak dibutuhkan. Diperkirakan sekitar 13 – 19 juta anak di bawah umur dan dibawah 18 tahun (10-15 % dari total karyawan yang bekerja di industri pariwisata) dipekerjakan di Industri Pariwisata diseluruh dunia. Bagaimanapun juga gambaran ini masih belum terhitung jumlah anak – anak dibawah umur yang bekerja di sektor penunjang lainnya. Kebanyakan mereka bekerja di sektor komersial yang berhubungan dengan kegiatan hotel, dunia hiburan, pengangkut barang, souvenir maupun restoran baik sebagai pelayan atau lainnya.

Daftar Pustaka

- Soekadijo, RG, *Anatomi Pariwisata*; Memahami Pariwisata sebagai "System Linkage", (Jakarta: Gramedia, 1996).
- S.J, James J. Spillane, *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, (Yogyakarta: Karnisius, 1994).
- Sumarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997).
- Wearing, Stephen and John Neil, *Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities*, (Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999).